

# RINGKASAN APBN TAHUN 2017

## 1. Pendahuluan

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang telah menjadi komitmen Pemerintah. Sejak tahun 2015, anggaran belanja negara tetap difokuskan pada anggaran infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap konsisten menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tahun 2015 diawali dengan perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L). Subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap yang hanya diberikan untuk solar, sedangkan premium sudah tidak lagi disubsidi, dan hasil penghematan digunakan untuk belanja yang lebih produktif. Pada sisi lain, belanja negara lebih diprioritaskan pada anggaran di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut juga didukung efisiensi belanja negara untuk menciptakan ruang fiskal, baik di K/L maupun pemerintah daerah. Reformasi struktur belanja negara dilanjutkan pada tahun 2016 yang disebut juga sebagai tahun percepatan penyerapan anggaran, dimana terdapat perubahan regulasi dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan tersebut yaitu memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih awal, yaitu pada kuartal ke empat tahun sebelumnya. Reformasi struktural belanja negara tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabinet Kerja dan didukung oleh segenap komponen bangsa telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk infrastruktur dalam Semester I tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Di samping itu, indikator di bidang kesejahteraan sosial mengalami perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan *Gini Ratio*, serta pengurangan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga terus mengalami peningkatan dari 68,90 tahun 2014 menjadi 69,55 tahun 2015.

Selanjutnya, tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran. Di bidang pendapatan negara, Pemerintah melanjutkan program *tax amnesty* dan melakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016. Di bidang belanja negara, dilakukan efisiensi pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah. Dengan demikian, APBN tahun 2017 dirancang lebih realistis, kredibel, dan efisien.

Kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2017. Tantangan ekonomi global tersebut diantaranya adalah (1) perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian; dan (2) masih relatif rendahnya harga komoditas. Sejalan dengan itu, faktor domestik dipengaruhi oleh (1) pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah; dan (2) perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara. Namun, kondisi ekonomi makro domestik tahun 2017 diharapkan sudah mulai membaik oleh dampak dari ditempuhnya berbagai kebijakan ekonomi di tahun 2015-2016.

Kebijakan APBN tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut. *Pertama*, optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Potensi penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. Kebijakan pendapatan negara juga didukung dengan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. *Kedua*, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) yaitu alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang masing masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari belanja negara. Strategi lain adalah dengan mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola *non cash*. Kebijakan pada belanja negara juga diarahkan pada penguatan desentralisasi fiskal melalui optimalisasi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat dan mengefektifkan belanja pada kementerian negara/lembaga dan dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. *Ketiga*, upaya untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang sehingga dapat terjaga tingkat kesinambungan fiskal.

APBN tahun 2017 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang harus sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memerhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2017 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sejalan dengan itu, tema RKP tahun 2017 ditetapkan: “*Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah*”. Tema tersebut akan dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

## **2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017**

Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meskipun masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat

namun masih terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang akan menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,8 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,3 persen di tahun 2016.

Sementara itu di sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi kontributor utama perekonomian nasional pada tahun 2017. Selain itu, belanja Pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Upaya tersebut didorong pula oleh dampak kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diterapkan mulai tahun 2016 yang diperkirakan akan mendorong investasi di sektor riil melalui repatriasi kepemilikan dana yang ada di luar negeri. Seiring dengan membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2017, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen per tahun; (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*) sebesar US\$45 per barel; (6) *lifting* minyak Indonesia sebesar 815 ribu barel per hari; dan (7) *lifting* gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015–2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2017, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global.

### 3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017 yang bertepatan dengan “*Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan*” menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2017. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2017 sebagai instrumen kebijakan fiskal disusun dengan mengacu kepada berbagai strategi, kebijakan, dan prioritas dalam RKP Tahun 2017.

Dalam APBN tahun 2017, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan strategis dalam APBN tahun 2017 yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Di sisi pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain melalui implementasi

kebijakan pengampunan pajak yang telah dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak tersebut ditempuh sebagai langkah untuk memperkuat pondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Selain itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, kebijakan penerimaan negara bukan pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya di sisi belanja negara, kebijakan diarahkan untuk: (1) peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, beras untuk rakyat sejahtera, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (4) memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; (5) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, konversi beras sejahtera (Rastra) menjadi layanan non tunai/kartu secara bertahap; (6) mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista. Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembiayaan tahun 2017 adalah: (1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas *manageable*; (2) Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro; (3) Memanfaatkan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (5) Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah; (6) Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (7) Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA); (8) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (9) Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejalan dengan upaya untuk menyusun pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan, Pemerintah melakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran dalam APBN 2017. Apabila sebelumnya struktur pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka struktur APBN 2017 pembiayaan anggaran diubah menjadi terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Selanjutnya, Pemerintah dalam APBN tahun 2017 mengalokasikan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp20.000 miliar. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi land bank, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi proyek strategis nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan ketahanan fiskal.

#### 4. Ringkasan Postur APBN tahun 2017

Postur APBN tahun 2017 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2017, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp1.750.283,4 miliar, yang berarti turun 2,0 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2016. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.498.871,6 miliar atau turun 2,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, PNBP ditetapkan mencapai Rp250.039,1 miliar, atau naik 2,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,6 persen dari total pendapatan negara.

Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.080.451,2 miliar, turun 0,1 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2016. Belanja negara di tahun 2017 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315.526,1 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp763.575,1 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp551.951,0 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764.925,1 miliar. Alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar alokasi anggaran belanja K/L adalah bentuk komitmen pemerintah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2017, belanja pemerintah pusat menurut fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 27,0 persen dan 23,6 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 49,3 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Hal itu selaras dengan arah kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp330.167,8 miliar atau 2,41 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2016 sebesar 2,35 persen. Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp330.167,8 miliar. Ringkasan postur APBN tahun 2016-2017 disajikan pada **Tabel I.1** berikut.

**TABEL I.1**  
**POSTUR APBNP 2016 DAN APBN TAHUN 2017**  
**(miliar rupiah)**

URAIAN	APBNP 2016	APBN 2017
A. PENDAPATAN NEGARA	1.786.225,0	1.750.283,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.784.249,9	1.748.910,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539.166,2	1.498.871,6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245.083,6	250.039,1
II. PENERIMAAN HIBAH	1.975,2	1.372,7
B. BELANJA NEGARA	2.082.948,9	2.080.451,2
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306.696,0	1.315.526,1
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	767.809,9	763.575,1
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	538.886,1	551.951,0
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	776.252,9	764.925,1
1. Transfer ke Daerah	729.270,8	704.925,1
2. Dana Desa	46.982,1	60.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105.505,6)	(108.973,2)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(296.723,9)	(330.167,8)
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB	(2,35)	(2,41)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	296.723,9	330.167,8
I. PEMBIAYAAN UTANG	371.562,6	384.690,5
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(93.984,8)	(47.488,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	461,7	(6.409,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(651,7)	(924,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19.336,1	300,0

Sumber: Kementerian Keuangan

## 5. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN tahun 2017

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar penghitungan dalam penyusunan postur APBN. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2017 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas.

Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur APBN tahun 2017 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan PNPB, dan mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH). Selanjutnya, kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut akan merupakan peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak realisasi peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut dapat berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu ada kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah

belanja atau mengurangi defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja.

Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas APBN tahun 2017 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang ditujukan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit APBN tahun 2017. Namun demikian, postur APBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur APBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan pemerintah. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2017 dirangkum dalam **Tabel I.2**.

**TABEL I.2**  
**SENSITIVITAS APBN 2017 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**  
(triliun rupiah)

URAIAN	2017					
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>10,4 - 15,6</b>	<b>8,8 - 10,0</b>	-	<b>3,6 - 4,9</b>	<b>3,4 - 4,0</b>	<b>1,6 - 3,0</b>
a. Penerimaan Perpajakan	10,4 - 15,6	8,8 - 10,0	-	1,8 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNPB	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,1 - 1,2</b>	<b>0,1 - 1,2</b>	<b>0,1 - 2,1</b>	<b>1,6 - 2,2</b>	<b>2,2 - 2,6</b>	<b>0,4 - 0,6</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 - 1,0	0,1 - 1,1	0,1 - 2,1	1,2 - 1,7	1,7 - 2,0	0,1 - 0,2
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,0 - 0,2	0,0 - 0,2	-	0,4 - 0,5	0,5 - 0,6	0,3 - 0,4
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,3 - 14,4</b>	<b>8,7 - 8,8</b>	<b>(2,1) - (0,1)</b>	<b>2,0 - 2,7</b>	<b>1,3 - 1,4</b>	<b>1,2 - 2,5</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	-	-	-	<b>(0,1) - (0,1)</b>	-	-
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,3 - 14,4</b>	<b>8,7 - 8,8</b>	<b>(2,1) - (0,1)</b>	<b>1,8 - 2,6</b>	<b>1,3 - 1,4</b>	<b>1,2 - 2,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan